



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMADI
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 439377

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.225.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/60 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
3. Tanah Seluas 1170 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 26.500.000
4. Tanah Seluas 465 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000
5. Tanah Seluas 704 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 17.500.000
6. Tanah Seluas 1036 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 25.500.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 921.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000



4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 168.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 153.914.148

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.468.414.148

III. HUTANG Rp. 120.113.673

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.348.300.475

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.